

# Jurnal Ilmiah Administratur

**Supardi**

**PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH DI INDONESIA**  
(Dosen STKIP Panca Sakti Bekasi)

**Cecep Pujawirawan**

**PENTINGNYA PELAYANAN PUBLIK PRIMA DALAM  
TATA KELOLA BPJS KESEHATAN JAWA BARAT**  
(Dosen Prodi Adm. Negara STIA Bagasasi Bandung)

**Tatang Sudrajat, M. Dadi Priadi**

**PARPOL DAN PEMILU : TANTANGAN UNTUK PEMANTAPAN  
DEMOKRASI DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM  
KERANGKA PEMBANGUNAN POLITIK**  
(Dosen FISIP Universitas Sangga Buana (USB) - YPKP Bandung)

**Sofyan Usman**

**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM PROYEK  
PEMBANGUNAN DENGAN METODE PERT DAN CPM**  
(Dosen Prodi Adm. Negara STIA Bagasasi Bandung)

**Asrofah, Harianto**

**PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP  
PENINGKATAN MINAT CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS  
JENDERAL ACHMAD YANI**  
(Dosen Prodi Adm. Bisnis STIA Bagasasi Bandung,  
Staff Universitas Jenderal Achmad Yani)

**Silahudin**

**MENYOROTI PARTISIPASI POLITIK DI ERA DISRUPSI**  
(Dosen Prodi Adm. Negara STIA Bagasasi Bandung)

**Sri Lestari**

**KEPEMIMPINAN DI ANTARA REALITAS, TUNTUTAN  
DAN HARAPAN**  
(Dosen Prodi Adm. Negara STIA Bagasasi Bandung)

**VOLUME 2**

**NO. 1**

**APRIL 2019**

DAFTAR ISI

- 1 **Supardi**  
PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH DI INDONESIA 1 - 9
- 2 **Cecep Pujawirawan**  
PENTINGNYA PELAYANAN PUBLIK PRIMA DALAM  
TATA KELOLA BPJS KESEHATAN JAWA BARAT 10 - 39
- 3 **Tatang Sudrajat, M. Dadi Priadi**  
PARPOL DAN PEMILU: TANTANGAN UNTUK PEMANTAPAN  
DEMOKRASI DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM  
KERANGKA PEMBANGUNAN POLITIK 39 - 49
- 4 **Sofyan Usman**  
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM PROYEK  
PEMBANGUNAN DENGAN METODE PERT DAN CPM 50 - 58
- 5 **Asrofah, Harianto**  
PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP  
PENINGKATAN MINAT CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS JENDERAL  
ACHMAD YANI 59 - 69
- 6 **Silahudin**  
MENYOROTI PARTISIPASI POLITIK DI ERA DISRUPSI 70 - 80
7. **Sri Lestari**  
KEPEMIMPINAN, DI ANTARA REALITAS, TUNTUTAN  
DAN HARAPAN 81 - 96

Jurnal Administratur (JATUR) berisi artikel ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun studi literatur yang berkaitan dengan bidang Ilmu Administrasi Negara/Publik dan Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis. JATUR diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi Bandung. JATUR terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober.

**PENANGGUNG JAWAB:**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi

**PENGARAH:**

Suharyono, S.T., M.M.

**DEWAN REDAKSI:**

Santi Maria, S.Sos, M.M. (Ketua)

Fitriani Fajar, S.Sos, M.M. (Anggota)

Novi Susyani, S.E., M.M. (Anggota)

**DEWAN EDITOR:**

Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si

Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D

Drs. Taufik Hidayat. Ph.D

Dra. Hj. Asrofah, M.M.

Drs. H. Sofyan Usman, M.Si.

Drs. Hendy Dwiyono Amir, M.Si.

**PRODUKSI DAN PEMASARAN:**

Juki Windarti, Amd.

**Alamat Redaksi:**

Jurnal Administratur

LPPM STIA Bagasasi

Jl. Cukang Jati No. 5 Gatot Subroto

Bandung 40273

**PARPOL DAN PEMILU: TANTANGAN UNTUK PEMANTAPAN  
DEMOKRASI DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA  
PEMBANGUNAN POLITIK**

**Tatang Sudrajat**

Email : id.tatangsudrajat@gmail.com

**M. Dadi Priadi**

dadi23priadi@gmail.com

Dosen Tetap FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung

**ABSTRAK**

Peran parpol dalam negara demokrasi sangat penting dan menentukan. Aktor-aktor yang ada di dalamnya dituntut berkontribusi bagi upaya perbaikan kesejahteraan rakyat. Kepentingan publik menjadi kata penting yang selalu harus menjadi acuan dalam segala kiprahnya. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, tuntutan akan pentingnya wawasan kebangsaan menjadi tidak terelakkan lagi. Parpol dan segenap aktvisnya dituntut selalu menunjukkan peran strategisnya bagi terjaminnya keutuhan bangsa. Pemilu merupakan momen yang tepat untuk menghadirkan jati dirinya. Fungsionalisasinya dalam merekam segenap aspirasi dan denyut kepentingan rakyat akan menjadi barometer bermakna tidaknya sebagai atribut demokrasi. Apa yang dilakukannya hari ini dan masa yang akan datang akan menjadi penopang penting bagi upaya pembangunan politik bangsa.

**Kata kunci:** partai politik, demokrasi, wawasan kebangsaan, pembangunan politik.

**ABSTRACT**

*The role of political parties in democratic countries is very important and decisive. Actors in it are required to contribute to efforts to improve people's welfare. The publik interest becomes an important word that always should be a reference in all their work. In a pluralistic society such as Indonesia, the demands of the importance of national awareness becomes inevitable. Political parties and all activist must always demonstrated its strategic role for ensuring the integrity of the nation. Election is a significant moment for presenting his identity. Functionalization himself in recording all the aspirations and interests of the people's pulse will be a meaningful barometer of whether or not an attribute of democracy. What it does today and the future will be critical to sustaining the nation's political development efforts.*

**Keywords:** *political parties, democracy, the concept of nationalism, political development.*

## A. PENDAHULUAN

Tahun politik saat ini, 2018-2019 yang ditandai oleh gelaran pemilu, pileg dan pilpres secara bersamaan pemungutan suaranya, telah banyak memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi perjalanan sejarah politik dan kenegaraan kita. Kelembagaan parpol dan para aktivisnya mendapatkan kesempatan yang penting untuk unjuk kinerja di hadapan rakyat. Pun demikian, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah menghadirkan berbagai peran politiknya, terutama pada masa kampanye. Berdasarkan pengamatan tampak bahwa keseluruhan gelaran politik ini berpotensi menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dalam bentuk sikap, ungkapan dan tulisan terutama di media sosial yang sarat dengan hoaks, ujaran kebencian, dan rasa permusuhan. Namun demikian itu semua merupakan proses yang harus dengan optimis dilalui dalam kerangka pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis.

Dalam konteks ini, kiranya patut disyukuri bahwa kita telah hidup di suatu era pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warganegara dalam berbagai segi kehidupan secara mendasar. Hal ini berangkat dari kesadaran dan pemahaman bersama bahwa implikasi bergemuruhnya roda reformasi setelah keruntuhan rezim Orde Baru lebih dari 20 tahun silam telah membawa perubahan sangat besar dalam perpartaipolitik di negeri ini. Publik menyaksikan bahwa keran keterbukaan dalam kemas demokratisasi dan kemerdekaan berekspresi yang telah terbuka lebar, telah mendorong kebergairahan sebagian elemen masyarakat mewarnai era ini, diantaranya dengan mendirikan partai politik (parpol). Secara kuantitatif hal ini tergambarkan dari adanya fakta tidak terbantahkan, berupa jumlah parpol peserta pemilu selama kurun waktu era reformasi yaitu 48 parpol (pemilu 1999), 24 (pemilu 2004), 38 (pemilu 2009), (pemilu 2014) dan 14 (pemilu 2019).

Fenomena politik seperti ini tentu saja menorehkan catatan positif bagi Indonesia yang sedang berkonsolidasi demokrasi. Namun demikian, tentu saja hal ini secara kualitatif patut diacungi pertanyaan mendasar tentang bagaimana kontribusi parpol ini bagi kemaslahatan dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam sebuah negara yang mengklaim diri demokrasi, keberadaan dan fungsionalisasi perannya akan menjadi parameter kunci, apakah dirinya hanya sekedar asesoris atribut sistem politik demokrasi atau benar-benar telah bermakna fungsional bagi kepentingan publik. Sejarah negeri ini dalam berpartai politik yang telah lebih dari 72 tahun dengan segala riak dan dinamikanya tentu bakal menjadi fenomena menarik untuk terus menerus dikaji.

Dalam konteks inilah, relevansi sosok dan kiprahnya bagi demokratisasi dan pembangunan bangsa ke depan akan bersinggungan dengan kerangka pembangunan politik yang sedang terus dipersiapkan. Hal inipun sekaligus akan menjadi fokus bahasan yang selalu menarik, sekurang-kurangnya karena beberapa hal. *Pertama*, pengalaman sebagai bangsa merdeka dengan segudang pengalaman berparpol, sudah seharusnya menjadi catatan berharga untuk kepentingan penataan kehidupan politik hari ini dan di masa depan. Apalagi bila diingat bahwa "tradisi" menjadikan parpol sebagai

institusi modern untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebenarnya sudah tersemai sejak awal abad ke 20, yaitu pada saat masih sebagai bangsa terjajah.

*Kedua*, gemuruh eforia reformasi yang dari hari ke hari semakin terasa di tengah-tengah masyarakat tidak seharusnya menjadikan elit politik "buta" terhadap realita yang berkembang di masyarakat. Salah satu buktinya, dari 48 parpol yang dijual pada pemilu 1999 yang mendapat dukungan nyata dan mempunyai wakil di Senayan tidak lebih dari 12 parpol. Artinya, kesadaran politik yang semakin baik dimiliki rakyat harus menjadi pertimbangan dalam perilaku politiknya. *Ketiga*, mengingat demokrasi dan kepentingan publik pada era *good governance* saat ini merupakan sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi, maka sudah saatnya pula semua pihak bertanya, bagaimanakah fungsionalisasi peran instrumentalnya secara nyata dalam mengusung demokratisasi. Parpol menurut Klingemann dkk. (2000:8) merupakan aktor-aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Atau sebagaimana dinyatakan Meehan dkk. (1966:7) bahwa dalam masyarakat demokratis, *political parties appear as the arteries of the body politic*.

*Keempat*, dalam 21 tahun era reformasi dapat dikatakan nyaris telah mewujudkan dengan sempurna apa yang dinamakan partitokrasi. Dalam arti, pembentukan segenap tatanan kelembagaan negara termasuk lembaga-lembaga quasi negara (*state auxiliary agencies*) nyaris semuanya melibatkan kewenangan parpol melalui kepanjangan tangannya yaitu para legislator yang berada di parlemen. *Kelima*, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa citra parpol saat ini di mata publik tengah mengalami kemerosotan sampai ke titik yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini antara lain sebagai dampak dari makin maraknya aksi-aksi korupsi dengan segala bentuknya yang dilakukan oleh sebagian anggota/kader parpol, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk yang berada di berbagai daerah. *Keenam*, keran keterbukaan dan kebebasan saat ini telah membawa dampak yang tidak selamanya konstruktif bagi tumbuh kembangnya wawasan kebangsaan. Berbagai bentuk sikap dan perilaku sebagian warga negara yang destruktif, eksklusif, intoleran, sektarian serta menghalalkan segala macam cara, sangat berpotensi merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, yang menjadi pertanyaan sentralnya adalah apa yang telah dan harus dilakukan parpol sebagai wujud nyata kontribusinya bagi konsolidasi demokrasi dan pemantapan wawasan kebangsaan dalam kerangka pembangunan politik bangsa. Secara lebih khusus, apa yang telah dan harus diperbuatnya bagi kepentingan rakyat banyak melalui fungsionalisasi peran instrumentalnya dalam konteks pembangunan politik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Parpol dan Negara Demokrasi**

Dalam literatur ilmu politik dan di kalangan para penstudinya disadari betul arti penting keberadaan parpol dalam sebuah negara yang menamakan diri demokrasi. Kepentingan publik akan diperjuangkan pada lembaga-lembaga politik, khususnya parlemen oleh parpol melalui anggota-anggotanya yang terpilih dalam pemilu. Otoritas

yang dimiliki sebagai anggota parlemen menjadi modal besar baginya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan publik.

Mengikuti pendapat Budiardjo, parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- biasanya dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya (2008:404). Dalam konteks relasi antara negara dengan rakyat, keberadaannya demikian strategis. Meehan dkk.menyebut bahwa *political parties are instruments for channeling opinion between the general population and the government. They have the task for informing, criticizing, exhorting, depending, or attacking government. As a communication channel, the political party is open at both ends, transmitting information, and criticism from people to government and information from government to people* (1966:28).

Dalam kaitan dengan keberadaan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) di masyarakat, Deutsch mengemukakan bahwa *political parties are key organizations for getting social and political results. They do so by aggregating several different interest group into a stable coalition which is strongest and more powerfull than any single interest group by itself* (1995:64). Parpol menurut Apter merupakan mata rantai yang menghubungkan publik dan pemerintah. Partai membangun koalisi kepentingan dan persuasi yang didukung oleh sebagian besar rakyat. Partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak, dan menjadi sesuatu yang sangat berlainan bagi sejumlah besar orang (1996:152)

Bila ditelusuri, dari akar kata "*demos*" dan "*cratos*", maka tak pelak lagi dalam negara demokrasi, keberadaan parpol sebagai wahana bagi rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya menjadi sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. *Key elements of a democracy* menurut Michael adalah *recognition of rights for individuals, consent of the people, accountability of decision makers to the people, representation, formal processes to demarcate and limit the role of decision makers* (2006:16). Menurut Marijan, parpol merupakan satu pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern (2010:59) atau sebagaimana dikemukakan Rodee dkk.bahwa tidak akan ada demokrasi yang efektif tanpa kompetisi partai politik (2008:219). *The characteristics of democratic government* menurut Michael salah satunya adalah *the principle of representation- the people who are subject to the laws must be equally represented in the legislative process that makes those laws* (2006:31). Dalam negara demokratis, diantara kriterianya adalah adanya hak warganegara untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk parpol dan kelompok kepentingan yang bebas serta para pejabat yang dipilih selalu berasal dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur, setiap unsur-unsur paksaan dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan (Dahl, 1982:18)

Oleh karena itu, membahas apa saja yang menjadi fungsinya dalam negara demokrasi menjadi bagian penting dari pembahasan partai politik secara keseluruhan. Terkait dengan ini, Budiardjo menyebut adanya empat fungsi partai politik, yaitu

sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik (2008:405-410). Dalam rumusan Ball, *one of the most important functions of political parties is that of uniting, simplifying and stabilising the political process. Political parties provide a link between government and people. They seek to educate, instruct and activate the electorate* (1975:81-82).

Secara normatif, parpol menurut Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warganegara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.

## 2. Parpol dan Wawasan Kebangsaan

Dari perspektif sejarah, tampak bahwa nilai-nilai dan semangat kebangsaan Indonesia terlahir dan diperkaya oleh dimanika dan romantika perjuangan yang ingin bangkit dan terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Bagi eksistensi suatu negara merupakan sesuatu yang bersifat mutlak adanya elemen yang dinamakan bangsa. Dengan mengutip pendapat Ernest Renan, saat pidato di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa syarat bangsa adalah "*le desir d'être ensemble*", yaitu kehendak akan bersatu, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Dikutipnya juga pendapat Otto Bauer, bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib (Bahar, dkk: 1992:02). Dikatakannya juga bahwa bangsa Indonesia, natie Indonesia bukanlah satu golongan orang yang hidup dengan "*le desir d'être ensemble*" di atas daerah yang kecil, tetapi seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai Irian.

Oleh karenanya wawasan kebangsaan menjadi sangat strategis perannya bagi keutuhan dan kedaulatan negara. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat majemuk dari berbagai aspek, maka potensi terjadinya disintegrasi bangsa sangat besar. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga saat ini, terasa sekali betapa pentingnya merawat spirit nasionalisme ini. Berbagai fakta sejarah telah menunjukkan hal ini. Terlebih-lebih pada era global saat ini, yang membuat dunia seakan tanpa ada sekat antar negara, merupakan tantangan tersendiri bagi upaya ini.

Karena itu, wawasan kebangsaan yang dilandasi nilai-nilai ideologis Pancasila, konstitusi (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika beserta atribut-atribut identitas nasional seperti lagu kebangsaan, bendera, lambang negara dan bahasa persatuan merupakan instrumen penting bagi keutuhan negara. Terkait dengan ini, peran parpol yang didalamnya antara lain terhimpun para legislator hasil pemilu sangat besar dalam memantapkannya.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain menyebutkan bahwa fungsi parpol sebagai sarana:



- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3. Fungsionalisasi Parpol

Kontribusi parpol bagi terbangunnya lembaga-lembaga kenegaraan, baik langsung maupun tidak langsung, serta penguatan perangkat kelembagaan politik yang ada dalam sistem administrasi negara secara keseluruhan pada era konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini, serta dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan, antara lain dapat diidentifikasi dari aktualisasi fungsi-fungsinya. Dengan merujuk kepada pandangan Budiardjo, maka fungsi-fungsi tersebut meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik.

Sangat dimafhumi bahwa dari sisi komunikasi politik, sangat disadari bahwa praktik administrasi negara dan pemerintahan selama ini seringkali muncul permasalahan-permasalahan yang secara substantif bilamana ditelusuri akar permasalahannya terletak pada lemahnya komunikasi antara tatanan suprastruktur dan infrastruktur politik. Publik kerap kali mendapat informasi yang tidak proporsional bahkan menyesatkan dari berbagai pihak tentang suatu isu publik. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila segenap aktor politik yang berada pada seluruh jajaran dan hirarki partai politik tampil cerdas menjelaskan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada sisi ini terdapat tuntutan sekaligus tantangan kepada segenap kader/anggota parpol, terlebih-lebih yang telah menjadi pejabat publik untuk terus menerus meningkatkan kemampuan diri terkait materi isu-isu publik yang tengah menjadi sorotan luas.

Seyogyanya sebagai legislator yang telah terpilih dalam pemilu, sebagai bagian dari *elected officials* (Howlett & Ramesh, 1995:21) dirinya merupakan aktor kunci yang sangat berperan penting bagi terlegitimasinya sebuah kebijakan publik melalui forum perjuangan politik di parlemen. Pada sisi lain, sangat besar pula kontribusinya dalam kiprah-kiprah keseharian dalam mengartikulasikan berbagai isu di masyarakat. Banyak persoalan yang muncul diantara dua pemilu yang memerlukan tampilnya para legislator sebagai komunikator yang andal. Berbagai isu terkait pemikiran dan aksi terorisme dan radikalisme serta makin banyaknya warga negeri yang kepincut kepada ISIS/NIIS saat ini, misalnya, yang berpotensi mengoyak-ngoyak keutuhan bangsa dan negara semestinya menjadi perhatian serius para legislator, sekurang-kurangnya untuk dikomunikasikan dengan konstituennya masing-masing.

Dari aspek sosialisasi politik, disadari bahwa lahirnya warganegara yang memiliki rasa pengabdian, tanggungjawab, kecintaan, komitmen yang tinggi serta persatuan dan kesatuan bangsa, bukan hanya semata-mata tanggungjawab pemerintah, khususnya institusi-institusi pendidikan. Berbagai permasalahan bangsa yang diantaranya terfokus pada lembaga-lembaga suprastruktur politik, khususnya legislatif dan eksekutif,

misalnya dalam bentuk perilaku koruptif, hedonis dan defisit integritas sangat boleh jadi merupakan akumulasi dari tidak maksimalnya peran sosialisasi politik. Seluruh slagorde parpol mempunyai peran dan tanggungjawab sangat besar, sekurang-kurangnya terhadap para anggota/kadernya, untuk dapat tampil sebagai warganegara yang berorientasi kepada kepentingan publik. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai (filosofis, etis, sosial) yang sangat penting bagi terbentuknya tatanan kehidupan demokratis serta upaya pemantapan wawasan kebangsaan, dengan demikian merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tatanan demokratis akan terbangun bukan hanya oleh penataan desain kelembagaan/struktur politik, tetapi juga oleh fakta sosiologis berupa telah *built in*-nya nilai-nilai demokrasi pada sikap dan perilaku individu. Dalam konteks inilah, peran para legislator dipertaruhkan melalui peran strukturalnya di parlemen dan peran personal sosiologisnya dalam persenyawaan dengan geliat hidup masyarakat.

Dari aspek rekrutmen politik, tampak pula bahwa salah satu persoalan krusial bangsa saat ini adalah krisis kepemimpinan. Sangat boleh jadi saat ini telah tampil pemimpin politik dan pemerintah pada berbagai jenjang yang kapabel tetapi tidak berintegritas. Dalam konteks ini peran kaderisasi di internal parpol menjadi sangat penting dan strategis. Tampilnya kader yang memahami secara komprehensif tentang visi, misi, platform dan garis perjuangan parpol sekaligus yang berwawasan kebangsaan merupakan satu tantangan tersendiri bagi partai politik saat ini. Bukanlah hal sulit untuk melahirkan politisi handal pada era multipartai saat ini. Justru kesulitan sangat terasa ketika saat ini Bangsa Indonesia sangat merasakan kurangnya pemimpin politik dan pemerintahan yang berkualifikasi negarawan.

Seorang aktivis politik termasuk mereka yang telah menjadi legislator dapat disebut negarawan manakala yang bersangkutan seluruh fikiran, sikap dan perilakunya secara utuh diabdikan untuk kepentingan publik, tidak lagi semata-mata berorientasi kepada kepentingan partai politik tempatnya bernaung. Sejarah politik kontemporer Indonesia telah menunjukkan bahwa parpol telah tampil sebagai salah satu kawah candradimuka yang strategis bagi lahirnya pemimpin bangsa yang berkualitas. Pada tatanan masyarakat yang masih kental dengan corak paternalistik saat ini, sangat boleh jadi berbagai bentuk sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan yang berpotensi mengoyak wawasan kebangsaan yang timbul di masyarakat lebih merupakan refleksi dari apa yang selama ini dipertontonkan para legislator dalam panggung politik. Disinilah terdapat tuntutan dan tantangan kepada para legislator untuk benar-benar tampil sebagai teladan bagi masyarakatnya. Tidak terlalu salah bila ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Dari aspek pengaturan konflik, fungsi parpol berkaitan dengan potensi-potensi konflik dalam masyarakat yang secara natural akan selalu ada. Terlebih-lebih dalam masyarakat Indonesia yang secara sosiokultural sangat heterogen, maka faktanya memang acapkali muncul konflik-konflik sosial berlatarbelakang sentimen-sentimen agama, kelompok, etnis atau golongan. Saat ini tidak jarang hal tersebut bahkan selalu berujung dengan tindak kekerasan dan kerusuhan massa, termasuk ketika berhadapan dengan aparat keamanan. Bila dibiarkan, bukan mustahil hal ini akan berkontribusi terhadap disintegrasi bangsa. Pada titik inilah parpol dituntut peran sebagai instrumen

demokrasi yang sekurang-kurangnya meminimalkan dampak dari konflik tersebut. Dalam rumusan Blondel, terkait dengan fungsi ini, *at the level of the society as a whole, political parties are general mechanisms by which conflicts are handled* (1995:133).

Tentu saja peran-peran eksternal seperti itu akan sangat tergantung kepada soliditas internal peran politik yang bersangkutan. Mustahil dirinya akan tampil sebagai sarana pengatur konflik kalau untuk *me-manage* dirinya sendiri sudah kelimpungan dan memakan energi organisasi yang besar. Secara organisatoris internal, merupakan permasalahan pula apabila ditengok sejarah perpolitikan Indonesia, khususnya di era pascakejatuhan rezim Orde Baru. Pada macam organisasi apapun, sebenarnya konflik itu sesuatu yang alamiah terjadi. Satu hal yang mengemuka saat ini adalah bahwa konflik seringkali dipandang sebagai sesuatu yang "aib" dan solusi terhadap konflik juga tidak mengedepankan cara-cara damai dan bermartabat. Kehidupan parpol saat ini masih menampilkan cara-cara penyelesaian konflik internal yang tidak sehat dan tidak dewasa.

Pada TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa telah mengingatkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Fenomena saat ini tampak bahwa hengkangnya elit-elit parpol dan berpindah ke parpol lain atau mendirikan partai politik baru seringkali dilatarbelakangi oleh kesadaran yang masih rendah terhadap makna konflik dalam organisasi serta penyikapannya secara dewasa dan bermartabat.

#### 4. Pembangunan Politik

Satu kata kunci tentang parpol dalam konteks pembangunan politik yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 adalah memperkuat peran parpol dalam kehidupan politik. Secara lebih operasional, hal ini sekurang-kurangnya meliputi aspek kemandirian dan kualitas parpol. Pada tataran praktis, kemandirian parpol pada dasarnya berwujud fungsionalisasi perannya dalam pola hubungan independen terhadap pihak eksternal, khususnya penguasa. Kualitas parpol berkaitan dengan fungsionalisasi perannya secara lebih signifikan bagi kepentingan publik.

Satu aspek penting dari pembangunan politik (*political development*) sebagaimana dikemukakan Lucian W. Pye adalah *capacity*. Dalam arti luas, hal ini merupakan sesuatu yang sejajar dengan makna kemandirian dan kualitas. Dari segi kemandirian, tampak bahwa secara umum parpol-parpol yang ada saat ini telah mampu menunjukkan kemandirian. Dapat dikatakan hampir tidak ada di era kehidupan politik pasca Orde Baru ini parpol yang dependen terhadap kekuasaan negara pada berbagai level pemerintahan. "Budaya" mohon restu dan audiensi untuk mendapatkan legitimasi tampak bukan lagi merupakan fenomena umum organisasi parpol saat ini.

Apabila dilihat dari aspek kepentingan yang lebih luas, dalam kedudukannya sebagai instrumen demokrasi, maka fungsionalisasi parpol dalam makna kualitas peran,

tampak masih jauh dari harapan. Peranan instrumentalnya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, artikulasi kepentingan publik, rekrutmen pemimpin bangsa dan manajemen konflik, serta secara lebih makro dalam rangka demokratisasi dan upaya pemantapan wawasan kebangsaan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kearah perbaikan. Kepercayaan publik kepada partai politik saat ini sudah berada pada titik nadir seiring dengan makin maraknya perilaku korup yang dilakukan sebagian anggota parlemen termasuk di berbagai daerah.

Telah mafhum diketahui bahwa politik adalah *the art of possible*. Politik pula yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan negara. Tidak ada pula kawan atau lawan yang abadi pada realitasnya, karena yang akan tetap muncul dan abadi adalah kepentingan. Namun demikian, satu hal yang patut selalu menjadi ingatan aktor-aktor politik, khususnya yang telah duduk di lembaga perwakilan sebagai legislator adalah bahwa sumber dari segala orotitas pada sebuah negara demokrasi modern adalah publik. Dari publiklah singgasana kekuasaan dapat mereka peroleh dan kepada publik pula semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kesadaran terhadap hal ini tampaknya masih lemah, seakan-akan kacang lupa pada kulitnya.

Seyogyanya patut disadari bahwa mandat yang pernah diberikan rakyat dalam pemilu dapat dicabut berupa munculnya pilihan rakyat kepada parpol dan calon anggota parlemen yang lain. Dari sisi interaksi kekuasaan politik hal ini merupakan bentuk hukuman nyata rakyat kepada parpol sekaligus kepada legislator yang telah jauh keluar dari harapan publik. Dengan kata lain, fungsionalisasi dalam arti peningkatan kualitas ini akan bersinggungan dengan akuntabilitas publik. Kualitas dalam konteks ini bukan saja dalam arti kapabilitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas-tugas kepolitikan khususnya keparlemenan, tetapi juga kualitas integritas. Dalam makna inilah berpolitik dengan hati nurani menemukan tempatnya.

Dalam transisi demokrasi, pemilu dengan segala dimensinya selalu jadi sorotan. Periode panjang diantara dua pemilu semestinya digunakan para legislator dan parpol untuk melakukan konsolidasi, bukan saja internal-organisatoris, tetapi juga eksternal kepada publik. Konsolidasi eksternal inilah yang secara riil bersentuhan dengan kemampuannya dalam fungsionalisasi perannya. Sementara ini yang tampak mengemuka, bahwa parpol dan para fungsionarisnya, termasuk yang sedang menjabat di kursi parlemen itu terasa geliatnya ketika hiruk pikuknya masa kampanye dan kegiatan lainnya dalam rangka pemilu. Tetapi, ketika rakyat kelimpungan karena beban hidup yang semakin berat nyaris suaranya tidak terdengar. Inilah yang dapat disebut sebagai ironisme di era yang disebut-sebut dengan sangat antusias sebagai reformasi.

Dikatakan, ironis, karena justru melalui pemilu inilah sebenarnya rakyat menggantungkan harapan untuk adanya perbaikan dari masa sebelumnya. Partai-partai besar pemenang pemilu, yang secara nyata menempatkan wakil-wakilnya di Senayan dan di DPRD, meminjam istilah Klingemann dkk. mestinya menjadi aktor-aktor utama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan publik. Adalah suatu ironi ketika para legislator yang berfungsi di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran yang semuanya difokuskan untuk kepentingan publik justru melupakan hulu dari sebuah kekuasaan negara modern, yaitu mandat rakyat.

### C. PENUTUP

Pembangunan politik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk terwujudnya sistem politik demokratis. Transisi menuju demokrasi substansial saat ini, sangat memerlukan langkah-langkah konsolidasi, tidak saja struktural tetapi juga kultural. Peran para legislator yang pada dirinya *inherent* keberadaan institusi parpol sangat berperan besar. Spirit nasionalisme yang diusung oleh para *founding father's* dengan nilai-nilai proklamasinya saat ini tengah mendapat ujian. Wawasan kebangsaan yang harus selalu menyala-nyala dalam diri tiap individu di republik ini, sedang dalam kondisi mengkhawatirkan.

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dinamika politik bangsa akan sangat diwarnai oleh sikap dan perilaku keberpihakan totalnya kepada kepentingan publik, penguatan nilai-nilai dan tatanan demokrasi serta pemantapan wawasan kebangsaan. Ibarat kehidupan organisma, parpol yang digerakkan oleh anggota/kadernya ibarat pembuluh darah yang menyebabkan kehidupan terus berdenyut. Sehingga, apabila parpol mengalami kecenderungan disfungsional, maka mati pulalah kehidupan dan dinamika bangsa ini.

Semuanya memang, terpulang kembali kepada komitmen politisi, terlebih-lebih yang sedang duduk di kursi parlemen sebagai aktivis parpol. Akankah mereka berperan sebagai politisi-negarawan atau hanya sekedar pekerja politik yang menjadikan status sebagai wakil rakyat semata-mata hanya untuk mempertahankan hidup tanpa kepedulian sedikitpun kepada publik. Kita lihat saja!

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik* (Alih bahasa: Setiawan Ahadi). Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Ball, Alan R. 1975. *Modern Politic and Government*. London: The McMilla Press. Ltd.
- Bahar, Saafroedin, dkk. 1992. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Blondel, J. 1995. *Comparative Government. An Introduction*. Second Edition. London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis. Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Deutsch, Karl. W. 1999. *Politics and Government. How People Decide their Fate*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Howlett, M & M. Ramesh. 1995. *Studying Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press.

- Klingenmann, Han – Dieter dkk. 2000. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi* (Alih bahasa: Sigit Jatmika). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marijan Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia . Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Meehan, Eugene J. dkk. 1966. *The Dynamics of Modern Government*. Tokyo: McGrew Hill. Kogakusha Ltd.
- Michael, Ewen J. 2006. *Ppublik Policy. The Competitive Framework*. Oxford University Press.
- Rodee. Carlton Clymer dkk. 2008. *Pengantar Ilmu Politik* (Alih bahasa: Zulfikly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025